

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Piutang Usaha

2.1.1 Pengertian Piutang

Dalam dunia bisnis, piutang merupakan strategi untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Piutang sendiri adalah salah satu aset yang dimiliki perusahaan yang timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas transaksi kredit yang telah dilakukan dan disetujui. Piutang adalah kekayaan atau aktiva yang timbul akibat dari adanya transaksi penjualan secara kredit (Margaretha dalam Widiasmara, 2014).

Menurut (Smith 2005) piutang dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai hak atau klaim terhadap pihak atas uang, barang, dan jasa (Daryati, 2021). Menurut (Anjarsari & Handayani, 2022) Piutang merupakan bentuk tagihan klaim perusahaan kepada pihak lain sebagai bentuk pelunasan atas barang atau jasa. Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa piutang adalah suatu hak perusahaan untuk menagih dan menerima pembayaran dari pihak tertagih atas kesepakatan transaksi penjualan secara kredit dengan adanya perjanjian dan persyaratan yang telah disetujui bersama.

2.1.2 Jenis Piutang Usaha atau Dagang

Piutang usaha dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan asal, bentuk, dan jangka waktu penagihannya. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam pengelolaan dan pelaporan piutang. Adapun jenis-jenis piutang antara lain sebagai berikut (D. Amalia, 2022):

a) Piutang Usaha (*Account Receivable*)

Pengertian piutang usaha atau dagang adalah total pembelian kredit dari pelanggan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang diperkirakan akan tertagih dalam tempo waktu 30-60 hari.

b) Wesel Tagih (*Notes Receivable*)

Wesel tagih merupakan surat resmi yang diterbitkan sebagai bukti adanya utang yang harus dibayar. Umumnya, wesel tagih memiliki jangka waktu pelunasan antara 60 hingga 90 hari atau lebih, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang timbul dari transaksi penjualan sering kali disebut sebagai piutang dagang (*trade account*).

c) Piutang Lain-Lain (*Other Receivable*)

Piutang lain-lain mencakup semua jenis piutang selain piutang dagang, seperti piutang bunga, gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, piutang ini tidak berasal dari aktivitas operasional utama perusahaan. Oleh karena itu, dalam laporan

keuangan, piutang lain-lain diklasifikasikan dan disajikan secara terpisah di neraca.

Selain itu, piutang juga dapat golongan ke dalam beberapa kategori, seperti:

- a) Piutang Lancar, piutang yang dapat ditagih sesuai dengan kesepakatan awal, baik dalam jangka pendek maupun sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.
- b) Piutang Tidak Lancar, piutang yang tertagih melebihi jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak penjual.
- c) Piutang yang Dihapuskan, piutang yang tidak dapat ditagih lagi akibat kondisi dari pembeli atau konsumen mengalami kerugian besar atau bangkrut.
- d) Piutang Dicadangkan, piutang yang telah disisihkan sejak awal sebagai antisipasi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan memerlukan sistem pengendalian internal yang berperan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal mencakup berbagai kebijakan, prosedur,

dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, mencegah tindakan kecurangan, serta meningkatkan ketepatan dan keandalan informasi keuangan. Salah satu sistem yang efektif bagi perusahaan adalah penerapan pengendalian internal yang baik.

Pengendalian internal adalah sebuah sistem yang dilakukan dengan tujuan mengendalikan aset-aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan (Yulita, 2024). Menurut Mulyadi (2017:129), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Endaryati (2021:54), sistem pengendalian internal adalah suatu upaya yang dipengaruhi pihak – pihak dalam perusahaan yaitu dewan komisaris, manajemen, dan juga personel satuan usaha lainnya yang dibuat untuk memiliki keyakinan yang cukup terkait dalam pencapaian tujuan terhadap keandalan laporan keuangan, ketepatan informasi dengan aturan yang ada, serta efektifitas kinerja perusahaan, dan juga efisiensi operasional perusahaan. Struktur pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan yang diperlukan dalam organisasi, terutama untuk memastikan efektivitas delegasi wewenang dan tanggung jawab. (Harared & Heriyanto, 2022).

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian intern menurut Endaryati (2021) adalah:

- 1) Menjaga kekayaan organisasi. Hal ini untuk memastikan semua aset tidak hilang atau berkurang.
- 2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran untuk data akuntansi.
- 3) Mendorong efisiensi. Dimana setiap penggunaan baik waktu maupun tenaga dipergunakan dengan optimal.
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Hal ini ditujukan agar tujuan perusahaan akan tercapai sesuai dengan keinginan stakeholder dengan berjalannya perusahaan sebaik mungkin.

2.2.3 Pengendalian Internal Akuntansi dan Administratif

Menurut Endaryati (2021:56), pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pengendalian Intern untuk Akuntansi (*Preventive Controls*).

Pengendalian Intern Akuntansi berfungsi untuk mencegah terjadinya inefisiensi dalam operasional perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melindungi kekayaan perusahaan serta memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi. Salah satu bentuk penerapan pengendalian ini adalah dengan memisahkan fungsi dan tanggung jawab di antara unit-unit dalam perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan transparansi dalam proses bisnis. Selain itu, pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi mencakup berbagai komponen penting, antara lain:

- a) Realibilitas pelaporan keuangan bahwa laporan keuangan harus benar – benar sesuai dengan kondisi perusahaan.
 - b) Efektifitas dan efisiensi operasi, dengan dilakukannya pengendalian maka pencapaian efektif dan efisien dapat dihasilkan baik dalam menggunakan waktu, uang dan tenaga.
 - c) Kesesuaian antirap eraturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa perusahaan dalam melakukan aktivitas tentu mengikuti peraturan dari pemerintah.
- 2) Pengendalian Intern dalam Administratif (*Feedback Controls*).

Pengendalian Administratif dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen serta mendorong dilakukannya efisiensi dalam operasional perusahaan. Pengendalian ini diterapkan setelah proses pengendalian akuntansi dilakukan. Contoh dalam pengendalian ini adalah pemeriksaan laporan hal ini untuk mencari penyimpangan yang ada dan agar dapat diambil tindakan.

2.2.4 Pengendalian Internal Piutang Berdasarkan Kerangka COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission atau disingkat dengan sebutan COSO adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tahun 1985 oleh lima asosiasi profesi di Amerika Serikat, yaitu *American Accounting Association (AAA)*, *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, *Financial Executives International (FEI)*, *The Institute of*

Internal Auditors (IIA), dan *The Institute of Management Accountants (IMA)*. COSO bertujuan untuk mengembangkan standar dalam pengendalian internal serta manajemen risiko guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Pada tahun 1992, COSO memperkenalkan *Framework of Internal Control* yang menjadi acuan dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Kerangka ini diperbarui pada tahun 2013 untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas bisnis modern. Konsep utama dalam kerangka ini adalah bahwa pengendalian internal bukan hanya tanggung jawab satu departemen, melainkan mencakup seluruh aspek organisasi.

Dalam pengelolaan piutang usaha, penerapan pengendalian internal yang baik sangat diperlukan untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih, meningkatkan transparansi pencatatan transaksi kredit, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan yang telah ditetapkan. Kerangka COSO menawarkan pendekatan sistematis dalam membangun pengendalian internal yang mencakup pencegahan, deteksi, dan respons terhadap risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Menurut COSO (2013), kerangka pengendalian internal dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tiga kategori tujuan utama. Pertama, tujuan operasional, yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi, termasuk pencapaian target operasional dan keuangan serta perlindungan aset

dari risiko kerugian. Kedua, tujuan pelaporan, yang mencakup penyusunan laporan keuangan dan non-keuangan yang akurat, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Ketiga, tujuan kepatuhan, yang memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Penelitian didasarkan pada pengendalian internal dalam COSO, berfokus pada kerangka pengendalian internal COSO 2013. COSO (2013:4) menyatakan pengendalian internal terbagi menjadi lima komponen pengendalian yaitu:

- 1) *Control Environment* / Lingkungan Pengendalian,
- 2) *Risk Assessment* / Penilaian Resiko,
- 3) *Control Activities* / Aktivitas Pengendalian,
- 4) *Information & Communication* / Komunikasi & Informasi,
- 5) *Monitoring Activities* / Aktivitas Pemantauan.

COSO (2013:4-6) menggambarkan keterkaitan antara kelima tujuan dan komponen pengendalian internal dalam bentuk visual berupa kubus sebagai berikut:



Gambar 2 Komponen Pengendalian Internal (*COSO Framework*)

1. Lingkungan Pengendalian (Kontrol)

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta dewan direksi dalam menegakkan integritas, etika, dan komitmen terhadap pengendalian.

Dalam COSO (2013:5) ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, yaitu:

- a. Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etis.
- b. Menjalankan tanggung jawab pengawasan.
- c. Menetapkan struktur, otoritas, dan tanggung jawab.
- d. Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi.
- e. Menegakkan akuntabilitas.

2. Penilaian Resiko

Penilaian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dalam piutang, risiko seperti keterlambatan pembayaran, pelanggan bermasalah, dan harus dianalisis sejak awal. Proses ini membantu perusahaan mengambil langkah antisipatif untuk menghindari kerugian. Penilaian risiko yang tepat akan memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi pengelolaan piutang berdasarkan profil risiko pelanggan.

Berdasarkan rumusan COSO, penilaian risiko dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan saling berkaitan, yang berfungsi untuk mengenali serta menilai berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Proses ini tidak dilakukan secara sekali jalan, melainkan berlangsung terus-menerus seiring dengan perubahan situasi internal maupun eksternal perusahaan. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai kemungkinan munculnya suatu peristiwa yang dapat memberikan dampak negatif terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menilai risiko ini secara cermat dan membandingkannya dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan, agar keputusan dan langkah yang diambil tetap berada dalam batas yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah langkah-langkah dan aturan yang dibuat untuk memastikan bahwa perintah atau kebijakan dari manajemen benar-benar dijalankan. Dalam pengelolaan piutang, kegiatan ini bisa berupa pengecekan dokumen sebelum menyetujui penjualan kredit, memisahkan tugas antara bagian penjualan dan pencatatan piutang, serta mencocokkan data pembayaran dari pelanggan. Langkah-langkah ini menjadi pertahanan awal agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan yang bisa merugikan perusahaan.

Dijelaskan dalam COSO (2013:5), aktivitas pengendalian merupakan instruksi dari manajemen untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Arahannya dijalankan melalui kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Aktivitas pengendalian diterapkan di seluruh tingkatan organisasi, pada berbagai tahapan proses bisnis, dan juga dalam sistem teknologi yang digunakan. Aktivitas ini dapat bersifat pencegahan maupun pendeteksian, serta mencakup tindakan manual maupun otomatis, seperti proses otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan peninjauan kinerja. Umumnya, pemisahan tugas diterapkan dalam perancangan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian. Namun, jika pemisahan tersebut sulit

dilakukan, manajemen akan menetapkan bentuk pengendalian alternatif yang sesuai.

Aktivitas pengendalian mencakup berbagai kegiatan berbeda, seperti pemberian otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi. Berdasarkan rumusan COSO, ditegaskan mengenai tiga prinsip dalam organisasi yang dapat mendukung aktivitas pengendalian internal yaitu:

- 1) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima.
- 2) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian berbasis teknologi guna menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- 3) Organisasi menerapkan aktivitas pengendalian dengan menetapkan kebijakan yang menjelaskan harapan yang harus dipenuhi, serta menyusun prosedur untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam praktik (Halawa, 2024).

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen ini penting dalam memastikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat tersedia bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Komunikasi yang efektif diperlukan agar kebijakan pengelolaan piutang tersampaikan dengan jelas kepada

staf terkait, serta agar laporan piutang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai informasi dan komunikasi (*information and communication*) dalam pengendalian sebagai bagian penting bagi setiap entitas dalam menjalankan tanggung jawab pengendalian internal untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi. Manajemen memerlukan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, guna mendukung kinerja seluruh komponen pengendalian internal. Informasi tersebut diperoleh atau dihasilkan melalui proses komunikasi yang berlangsung secara kontinu, berulang, dan saling berbagi antara pihak internal dan eksternal. ebagian besar organisasi membangun sistem informasi yang terstruktur (Halawa, 2024).

5. Pemantauan

Pemantauan bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan secara efektif, serta memastikan adanya tindakan korektif apabila ditemukan kekurangan. Dalam pengelolaan piutang, pemantauan berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan sejak awal dan menjaga agar kebijakan yang diterapkan tetap sesuai.

COSO (2013:5) menjelaskan aktivitas pemantauan dalam pengendalian internal: *“Ongoing evaluations, separate evaluations, or some combination of the two are used to ascertain whether each of the five components of internal control, including controls to effect the principles within each components, is presents and functioning. Ongoing evaluations, built into business processes at different levels of the entity, provide timely information. Separate evaluations, conducted periodically, will vary in scope and frequency depending on assessment of risk, effectiveness of ongoing evaluations, and other management considerations. Finding are evaluated against criteria established by regulators, recognized 30 standars-setting bodies or management and the board of directoras as appropriate.”* (Halawa, 2024).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh COSO diatas, pemantauan dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kelima komponen pengendalian internal beserta prinsip-prinsipnya berjalan dengan baik. Evaluasi terpisah dilakukan secara berkala sesuai tingkat risiko dan efektivitas pemantauan yang telah ada. Hasil pemantauan kemudian dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh regulator, badan pembuat standar, atau manajemen dan dewan direksi.

2.3 Unsur Pokok Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016:130) ada 4 (empat) unsur pokok pengendalian internal:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan dan beban.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amelia & Prihanisetyo (2023)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Menggunakan Pendekatan <i>Committee Of Sponsoring Organization Of Treadway Commission</i> (COSO) Pada Piutang Usaha Untuk Mengurangi	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pengendalian internal piutang usaha di PT. XYZ secara umum berjalan efektif, terutama pada aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, meskipun masih ditemukan kelemahan dalam aktivitas pengendalian akibat perangkapan tugas dan tidak adanya pemisahan fungsi penjualan dan kredit

		Risiko Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus Pada Pt.Xyz Balikpapan)		yang dapat menimbulkan risiko kecurangan serta kesalahan pencatatan.
2	R. Amalia, (2022)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Usaha Pada Pt. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Analisis Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian internal piutang usaha di PT Inalum (Persero) dinyatakan telah berjalan efektif pada seluruh komponen COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang ditunjukkan melalui penerapan kebijakan, prosedur, evaluasi rutin, serta penggunaan informasi yang relevan dalam pengelolaan piutang.
3	Hastuti et al., (2021)	Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Perguruan Tinggi Negeri (Suatu Studi Kasus)	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern piutang masih kurang efektif. Hanya unsur pemantauan yang berjalan cukup baik. Temuan ini menjelaskan penyebab

					utama dari permasalahan piutang yang terjadi.
4	Pryhanni & Agha (2023)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih pada PT Kaya Raya Turun Temurun	Sistem Piutang	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan sistem pengendalian internal piutang di PT Kaya Raya tergolong efektif pada aspek informasi, komunikasi, dan pengawasan, serta cukup efektif pada komponen lainnya. Meski bermanfaat dalam meningkatkan ketertagihan piutang, masih ditemukan celah pengendalian seperti penyimpangan prosedur kredit, pencatatan yang lemah, rangkap jabatan, dan kurangnya evaluasi berkala.
5	Ayu (2023)	Analisis Sistem Pengendalian Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih pada PT. Abadi Sakti Mitra Mandiri	Sistem Terhadap Tak Tertagih pada PT. Abadi Sakti Mitra Mandiri	Analisis Deskriptif Kualitatif	Sistem pengendalian internal di PT. Abadi Sakti Mitra Mandiri berjalan cukup baik, namun peran ganda AR sebagai <i>Sales Counter</i> mengurangi efektivitas estimasi risiko piutang. Disarankan pemisahan tugas dan penguatan pengendalian agar piutang tak tertagih dapat ditekan.

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2025.

